

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : MUHAMMAD RIQKI NUGRAHA
NPM : 1905170172
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD RIQI NUGRAHA
N P M : 1905170172
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si.

Penguji II

DIAN YUSTRIAWAN, SE., M.Si

Pembimbing

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si., Ph.D

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

Sekretaris

Assof. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Laporan Magang ini disusun oleh :

NAMA : MUHAMMAD RIQKI NUGRAHA
NPM : 1905170172
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 14 NOVEMBER 2025

Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Sukma Lesmana S.E.,M.Si.,Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(M.Shareza Hafiz, SE., M.ACC)





Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Radiman, SE., M.Si)

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Muhammad Riqki Nugraha
NPM : 1905170172
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D
Judul Penelitian : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

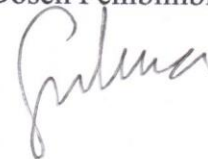
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2	- indikator diganti menjadi unsur-unsur	1/9/2025	
Bab 3	- Jelaskan berapa rencana responden yang akan diminta mengisi kuesioner	12/9/2025	
Bab 4	- Jelaskan berapa responden yang menjawab koesioner	12/9/2025	
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Hasil diskusi dan pembahasan di sidang	15/9/2025	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M Shareza Hafiz, SE., M.Acc)

Medan, 15 SEPTEMBER 2025

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing



(Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D)

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riqki Nugraha

NPM : 1905170172

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Sektor Publik

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tugas Akhir ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



M. Riqki Nugraha
NPM 1905170172

ABSTRAK

Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Muhammad Riqki Nugraha

Program Studi Akuntansi

Email : rikinugraha288@gmail.com

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sistem akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan provinsi sumatera utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data dokumentasi, koesioner dan observasi yang diperoleh dari website BPKAD Prov. Sumatera Utara. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari koesioner dan observasi data laporan keuangan BPKAD bahwa Sistem akuntansi pemerintahan mampu mencapai tujuan pengelolaan keuangan, efisiensi dapat meminimalisir waktu yang dibutuhkan, transparansi yang dihasilkan mudah dipahami dan di akses oleh publik yang artinya sistem akuntansi pemerintahan sangat berhubungan dengan peningkatan laporan keuangan. Sedangkan Standar Akuntansi pemerintahan sesuai dengan prinsip akuntansi, implementasi seperti kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi memadai, hanya saja hasil observasi pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk efektifitas pengelolaan keuangan kurang efektif dan tingkat efisiensi yang tidak efisien hal ini dapat diliat total anggaran lebih tinggi dan realisasi yg terjadi dan realisasi pendapatan lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Analysis of Government Accounting Systems and Government Accounting Standards in Improving the Quality of Financial Reports of North Sumatra Province

Muhammad Riqki Nugraha

Accounting

Email : rikinugraha288@gmail.com

This research is research conducted to determine and analyze the government accounting system and government accounting standards in improving the quality of financial reports in North Sumatra Province. This study uses a descriptive approach, using documentation and observational data sources obtained from the North Sumatra Provincial BPKAD website. The analysis used descriptive statistics.

Based on the results of the study, it can be concluded that the government accounting system is capable of achieving financial management objectives. Efficiency can minimize time requirements, and transparency is easily understood and accessed by the public. This means that the government accounting system is closely related to improving financial reports. While the Government Accounting Standards comply with accounting principles, implementation challenges include a lack of understanding and readiness of human resources and an adequate information system. However, observations of the implementation of the Government Accounting Standards indicate a lack of effectiveness and efficiency in financial management. This is evident in the higher total budget and lower revenue realization compared to regional expenditure realization.

Keywords: Government Accounting System, Government Accounting Standards, and Financial Report Quality.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, penulis dapat menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul **“Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara”**. Shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan membawa keselamatan dalam kehidupan dan akhirat. Skripsi ini dapat selesai tepat waktu karena tidak lepas dari bantuan Kedua Orangtua dan Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan semangat dan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Radiman, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak M. Shareza Hafiz.,SE., M.Acc., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak M.Firza Alpi, SE., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi menyelesaikan proposal ini..
8. Sahabat sahabat saya yang selalu membantu saya memberikan semangat dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan kemampuan yang masih terbatas, penulis sangat menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 2026
Penulis

Muhammad Riqki Nugraha
1905170172

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan	14
2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah	18
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah	20
2.2 Kerangka Berpikir	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2 Definisi Operasional	28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.3.1 Tempat Penelitian.....	33

3.3.2 Waktu Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
BAB 4 HASIL PENELITIAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan BPKAD Sumatera Utara	37
4.1.2 Analisis Persentase Jawaban Responden	42
4.1.2.1 Analisis Persentase Jawaban Responden Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah	43
4.1.2.2 Analisis Persentase Jawaban Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	45
4.1.2.3 Analisis Persentase Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan	47
4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian	49
4.2 Pembahasan.....	61
BAB 5 PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pernyataan Kualitas Laporan Keuangan	29
Tabel 3.2 Pernyataan Sistem Akuntansi Pemerintah	31
Tabel 3.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah	32
Tabel 3.4 Waktu Penelitian	33
Tabel 4.1 Kriteria Jawaban Responden	42
Tabel 4.2 Presentase Jawaban Responden Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah	43
Tabel 4.3 Presentase Jawaban Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	45
Tabel 4.4 Presentase Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Thn 2023....	3
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	25
Gambar 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun 2023	53
Gambar 4.2 Neraca Periode Tahun 2023.....	54
Gambar 4.3 Laporan Arus Kas Periode Tahun 2023	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintahan daerah provinsi yaitu dari Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota yang masing masing memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat untuk melihat hasil kegiatan keuangan daerah yaitu melihat Laporan keuangan pemerintahan. Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan, Fahmi (2013 : 2) dalam (Nurhasanah et al., 2018). Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 7 tahun 2010).

Menurut (Ikhyarti & Aprila, 2019), Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik jika memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang dapat menghindari suatu kesalahan dalam material dimana laporan keuangan dapat dibandingkan dari periode sebelumnya dan periode yg akan datang.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan berhubungan erat dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Suatu pemerintahan memberikan perubahan yang sangat besar di berbagai bidang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pada tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan LHP atas LKPD Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 28 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan 28 pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Meskipun 82,35% Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan 66 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 334 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD pada 34 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dari 66 LHP (non Banparpol) secara keseluruhan mengungkapkan 669 temuan dan 2223 rekomendasi. Ringkasan atas LHP tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut.

	Temuan	Rekomendasi	Jumlah Permasalahan	Nilai Permasalahan	Jumlah LHP
LKPD	421	1.444	665	195.662.376.404	34
Kinerja	113	320	144	-	14
PDTT	135	459	212	196.232.866.897	18
Jumlah	669	2.223	1.021	391.895.243.301	66

Sumber : Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) BPK

Gambar 1.1 : Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2023

Dari 66 LHP Keuangan/Kinerja/PDTT yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 1021 permasalahan senilai Rp391,90 miliar. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 678 permasalahan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 198 permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak efektif sebanyak 145 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri dari 563 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) senilai Rp391,90 miliar dan 115 masalah ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi. Sedangkan permasalahan kinerja terdiri dari 144 masalah ketidakefektifan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pimpinan entitas antara lain :

- a. Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar

menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah.

- b. Terkait dengan permasalahan administrasi dan kelemahan SPI, pimpinan entitas terkait agar menertibkan pencatatan dan penyusunan laporan, meningkatkan pengendalian atas pengelolaan keuangan, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Sebagai upaya nyata peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara berupa laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa ada dua jenis konsolidasi, yaitu konsolidasi fiskal dan konsolidasi statistik keuangan pemerintah. Konsolidasi fiskal merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian disusun menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) sesuai dengan prinsip dan aturan akuntansi dengan merujuk pada PSAP Nomor 11.

Menurut (Sinurat et al., 2023), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

Sistem Akuntansi Pemerintahan meliputi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang merupakan terdiri dari beberapa unsur yaitu PP No. 60 Tahun 2008 :

(1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan Pengendalian Internal. Menurut (Baihaqi, 2018), Sistem akuntansi pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013).

Sebagai upaya nyata peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara berupa laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa ada dua jenis konsolidasi, yaitu konsolidasi fiskal dan konsolidasi statistik keuangan pemerintah. Konsolidasi fiskal merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian disusun menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) sesuai dengan prinsip dan aturan akuntansi dengan merujuk pada PSAP Nomor 11.

Menurut (Sinurat et al., 2023), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

Sistem Akuntansi Pemerintahan meliputi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang merupakan terdiri dari beberapa unsur yaitu PP No. 60 Tahun 2008 : (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) Pemantauan Pengendalian Internal. Menurut (Baihaqi, 2018), Sistem akuntansi pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013).

Menurut (Ikhyarti & Aprila, 2019), Berdasarkan peraturan pemerintahan No. 60 Tahun 2008, bahwa proses seluruh aktifitas audit, pemantauan, evaluasi, reviu, dan aktifitas pengecekan yang melakukan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan rangka keyakinan yang memadai suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai pada tolak ukur dengan yang telah dilakukan secara efektif dalam pemerintahan mewujudkan tata pengelolaan yang baik.

Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam siklus APBN, Setiap tahunnya akan ada periode pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di tahun yang berkenaan. Bentuk pertanggungjawaban bagi setiap pengguna Anggaran adalah Laporan keuangan kementerian/Lembaga (LKKL) yang merupakan amanat dari undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Praktik BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidangperbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan Aset;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaanaset; pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
- b. Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuandan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD; Menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. Menyelenggarakan penetapan SPD; Menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; Menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
- h. Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- i. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah , terpadu dan selaras;
- j. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

- k. Menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- l. Menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- m. Menyelenggarakan dan mendistribusi tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;
- n. Menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- o. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, dan pengendalian administrasi pemerintah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
- p. Menyelenggarakan dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat

pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : Sekretaris, Bidang Pengelolaan Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Sumatera Utara (LKPD) tahun 2023 yang perlu dapat perhatian adalah sebagai berikut :

- a. Hasil Pemeriksaan LK pemrov sumut tahun 2023 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). BPK menekankan beberapa area yang memerlukan perhatian khusus terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan Dimana BPK mendapati permasalahan terhadap penganggaran lain lain penghasilan asli daerah (PAD) yang tidak rasional dan penggunaan dana bagi hasil pajak bagian kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan.
- b. Pertanggung jawaban belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan Multi Years Contract yang akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
- c. Kekurangan volume/mutu pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah provinsi sumut yang tidak sesuai kriteria desain. Selain itu, kekurangan volume juga ditemukan atas 14 paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Positif dan Signifikan, (Sanjaya, 2017). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas , maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara**” .

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian dalam laporan sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah.
2. Adanya permasalahan terhadap penganggaran lain lain penghasilan asli daerah (PAD) yang tidak rasional terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah.
3. Adanya penggunaan dana bagi hasil pajak bagian kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah.

4. Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan Multi Years Contract yang akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dijadikan pokok pembahasan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standard Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini yaitu mampu memberikan kontribusi dibidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standard Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak pihak yang bersangkutan dalam penelitian.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang menganalisis laporan keuangan daerah sumatera utara sehingga penelitian dapat bermanfaat terhadap laporan keuangan daerah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keangan biasanya meliputi Laporan Laba Rugi, Ekuitas atau perubahan posisi keuangan, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan.

Menurut Sari & Nurlaila (2022),Laporan Keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan disajikan setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan laporan keuangan tersebut diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Menurut Slamet & Irmadiani (2022), Laporan Keuangan merupakan bentuk bertanggung jawaban entitas publik yang berisi informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi sesuai peraturan yang berlaku dan Kualitas Laporan Keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat.

Kesimpulannya, Laporan Keuangan adalah hasil laporan yang dilakukan dalam suatu perusahaan untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dalam periode tertentu.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Sari & Nurlaila (2022), Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan dengan tepat waktu dan dapat diandalkan. Laporan keuangan dibuat mempunyai tujuan dan fungsi secara umum bagi pemerintahan, antara lain Mardison (2018) dalam Sari & Nurlaila (2022) :

- a) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam keputusan ekonomi, social, dan politik serta bukti pertanggungjawaban (Accountability) dan pengolahan (Stewardship).
- b) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional..

c. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik dari kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini adalah prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Menurut Abdullah & Putra Nainggolan (2019), Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2007 : 31) Karakteristik laporan Keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 Karakteristik Laporan Keuangan yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintahan dapat memenuhi kualitas yaitu :

1. Relevan, Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
 - b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
 - c. Tepat waktu (timeliness)
 - d. Lengkap
2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- a. Penyajian Jujur
 - b. Dapat diverifikasi
 - c. Netralitas
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
 4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

d. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Standard Akuntansi Pemerintahan (2007 : 29) Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen melalui koordinasi organisasi formulir, catatan dan laporan Menurut Zahro (2019) dalam Kapantow et al (2023).

Menurut Baihaqi (2018), Sistem akuntansi pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013.

Menurut Abdullah & Putra Nainggolan (2019), Sistem Informasi Akuntansi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan akurat, yang bertujuan untuk bahan laporan kepada investor, pemerintah dan dinas perpajakan di suatu negara.

Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan Bab I Pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu aspek yang diberikan dukungan kontrol dengan melakukan laporan kinerja pemerintah, hal ini didukung PMK no. 233/PMK.05/2011 Pasal 1 Nomor 8, dimana sistem akuntansi pemerintah ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Menurut Billy (2016), Sistem Akuntansi Pemerintah berdasarkan PMK PP 71 Tahun 2010 rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sistem akuntansi pemerintahan adalah sistem yang mencakup pendaftaran, klasifikasi, interpretasi, ringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi atau peristiwa ekonomi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Menurut Lutfiyanti (2018:12) dalam Mas'ut et al (2023).

b. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak pihak diluar organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, Menurut Ratna (2010 ; 8) dalam (Baihaqi, 2018).

Menurut Baihaqi (2018), tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan yaitu :

1. Untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
2. Untuk mengoperasionalkan prinsip prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi.

c. Unsur - Unsur Sistem Akuntansi Pemerintahan

Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 77 tahun 2020 menyebutkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri atas pembukuan, pengikhtisaran, dan pelaporan.

Unsur - unsur sistem akuntansi pemerintahan menurut Lutfiyanti (2018 : 12) dalam Mas'ut et al (2023) yaitu :

1. Pencatatan

Pencatatan laporan keuangan pemerintah di indonesia mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mencakup berbagai laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pengikhtisaran

Pengikhtisaran laporan keuangan pemerintah adalah tahap dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang melibatkan penyusunan ikhtisar dari berbagai transaksi dan data keuangan untuk membentuk laporan keuangan komprehensif dan akurat.

3. Pelaporan

Pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah adalah proses penyusunan, penyajian, dan penyampaian informasi keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberikan akuntabilitas, transparansi, dan dasar untuk pengambilan keputusan.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah Nomor 04 atau PSAP 04 adalah pernyataan standard akuntansi pemerintah tentang catatan atas laporan keuangan.

Manurut Sinurat et al (2023), Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Rizki & Rialdy (2023) Standar akuntansi pemerintah atau yang dikenal dengan SAP diterbitkan oleh komite Standar Akuntansi

Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini kemudian tidak hanya berisi mengenai penjelasan yang diberikan pemerintah nasional namun diberikan juga oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (A Manual Government Accounting).

Menurut Sanjaya (2017), Standard Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahn daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Billy (2016), Standar Akuntansi Pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah dan meyusun laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kesimpulan dari Standar Akuntansi Pemerintah adalah pedoman dan landasan bagi pemerintah yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

b. Peran Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun peran dari akuntansi pemerintah ini diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, ini kemudian mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk bias sampai pada tujuan yang telah atau sudah ditetapkan dengan secara periodic.
2. Manajemen, membantu para nasabah untuk kemudian mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dapat memudahkan perencanaan, pengelolaan serta juga pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintahn untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparasi, memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders.
4. Evaluasi Kinerja, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja transparansi.
5. Keseimbangan Antargenerasi, memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

c. Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan tersebut tentu memiliki karakteristik khusus, apabila dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Dibawah ini merupakan ciri atau karakteristik akuntansi pemerintahan diantaranya :

1. Pemerintah itu mencatat anggaran pada saat anggaran dibukukan

2. Pemerintah tersebut tidak berorientasi pada keuntungan hingga di dalam akuntansi pemerintahan tersebut kemudian tidak ada laporan laba dan juga treatment akuntansi yang berkaitan.
3. Sangat mungkin menggunakan dana lebih dari satu.
4. Sifatnya kaku disebabkan karena tergantung pada perundang undangan.
5. Membukukan pengeluaran modal Tidak memerlukan perkiraan modal dan juga laba yang di tahan dalam neraca.

d. Unsur - Unsur Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan tersebut tentu memiliki karakteristik khusus, apabila dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Dibawah ini merupakan ciri atau karakteristik akuntansi pemerintahan diantaranya :

- 1) Pemerintah itu mencatat anggaran pada saat anggaran dibukukan
- 2) Pemerintah tersebut tidak berorientasi pada keuntungan hingga di dalam akuntansi pemerintahan tersebut kemudian tidak ada laporan laba dan juga treatment akuntansi yang berkaitan.
- 3) Sangat mungkin menggunakan dana lebih dari satu.
- 4) Sifatnya kaku disebabkan karena tergantung pada perundang undangan.
- 5) Membukukan pengeluaran modal Tidak memerlukan perkiraan modal dan juga laba yang di tahan dalam neraca.

Menurut Bachtar Arif dkk (2002 : 9) dalam Rizki & Rialdy (2023) indikator standar akuntansi pemerintahan :

1. Penerapan berbasis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas.

2. Penerapan berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Penyajian secara wajar.

2.2 Kerangka Berpikir

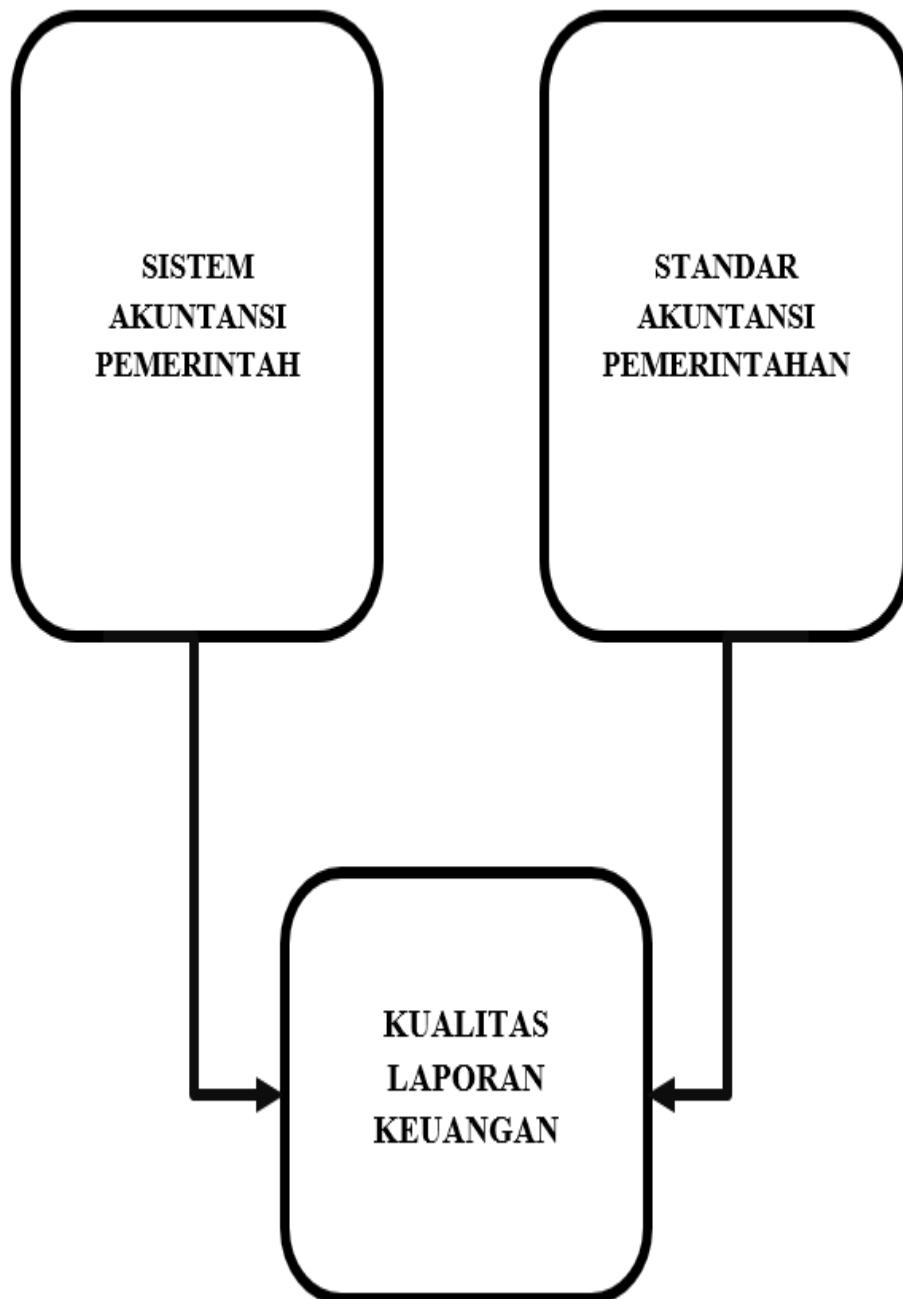
Kerangka berfikir adalah model atau gambar konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini memiliki kerangka penelitian mengenai Analisis Sistem Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Dan Keuangan Asset Daerah, dimana Sistem Akuntansi Pemerintah adalah sistem yang mencakup pendaftaran, klarifikasi, interpretasi, ringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi atau peristiwa ekonomi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam tindak penyusunan & penyajian laporan keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tahun 2010 tentang penggunaan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Pemerintah merencanakan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual selambat lambatnya tahun 2015. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dapat meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik yang dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi serta mampu mendorong peningkatan integritas suatu organisasi.

Menurut Sanjaya (2017), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, perbedaanya terletak pada penempatan posisinya, yaitu kalau standar akuntansi pemerintahan lebih kepada dasar aturan keuangan daerah yang mengatur daerah itu semestinya, sedangkan system akuntansi keuangan daerah lebih kepada seperangkat prosedur yang mengatur segala proses dan kegiatan yang ada pada pencatatan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah suatu struktur atau rencana yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memadu dan mengorganisir data, serta mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara mendalam.

3.2. Definisi Operasional

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang di definisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Data yang diteliti adalah BPKAD Provisi Sumatera Utara periode tahun 2023.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah proses penyusunan dan pelaporan keuangan yang diikuti oleh pemerintah daerah (PEMDA) untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan APBD. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Langkah Langkah prosedur laporan keuangan pemerintah daerah :

- a) Pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan ditingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD), Transaksi keuangan dicatat dalam buku jurnal dan di posting ke buku besar dan buku pembantu untuk rincian akun tertentu
- b) Penyusunan laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian meliputi LRA (Laporan Realisasi anggaran), LO (Laporan Operasional), Neraca, dan Laporan Arus Kas diserahkan kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi
- c) Konsolidasi Laporan Keuangan (SKPD), PPKD mengumpulkan dan menggabungkan laporan keuangan SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
- d) Penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan gabungan laporan keuangan semua SKPD
- e) Pelaporan dan pertanggung jawaban disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan daerah dengan dilampiri surat pernyataan kepala daerah mengenai pengelolaan APBD.

Adapun beberapa pernyataan yang diberikan untuk BPKAD Prov. Sumut :

Tabel 3.1.
Pernyataan Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan (Y)	
1	Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2	Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keuntungan
3	Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu (feedback value)
4	Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian di masa datang (predictive value)
5	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan
6	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu
7	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
8	Pemerintahan daerah menggunakan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun
9	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
10	Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah sistem yang mencakup pendaftaran klasifikasi, interpretasi, ringkasan dan pelaporan keuangan transaksi atau peristiwa ekonomi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pedoman sistem akuntansi pemerintahan daerah bertujuan memberikan petunjuk bagaimana penyusunan laporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan. Data pengelolaan keuangan daerah yang akan

disusun sebagai laporan keuangan diperoleh dari perencanaan (penganggaran), penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam rangka prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Adapun beberapa pernyataan yang diberikan untuk BPKAD Prov. Sumut :

Tabel 3.2.
Pernyataan Sistem Akuntansi Pemerintah
Sistem Akuntansi Pemerintah (X1)

1	Penerapan Sistem akuntansi dalam BKAD sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)
2	Dalam BPKAD telah melakukan analisis / identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan.
3	Staff yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan telah memahami Permendagri nomor 77 tahun 2020.
4	Telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi pada instansi tempat saya bekerja.
5	Dalam BPKAD telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.
6	Telah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset pada instansi tempat saya bekerja
7	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
8	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik
9	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif
10	Pimpinan telah melakukan pemantauan sistem pengendalian intern dalam rangka memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya bisa segera ditindaklanjuti.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat, andal, relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Prosedur standar akuntansi pemerintah mencakup aspek mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan informasi keuangan.

Kebijakan akuntansi pemerintahan yaitu penetapan pilihan entitas pemerintah atas prinsip prinsip, dasar dasar, praktik praktik, spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Adapun beberapa pernyataan yang diberikan untuk BPKAD Prov. Sumut :

Tabel 3.3.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi pemerintahan (X2)

1	Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu. Yaitu kemandirian ,entitas,Adanya kesinambungan entitas.
2	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.
3	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan yaitu , terbatas pada laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan.
4	Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik
5	Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya
6	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya
7	Laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib disepakati oleh DPRD
8	Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi
9	Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
10	Pegawai yang bekerja di BPKAD memiliki kemampuan dan mampu menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 18, Madras Hulu, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan dari bulan Desember 2025. Adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Des 24				Jan 25				Feb 25				Mar 25				Apr 25				Jun 25	Jul 25	Agst 25			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																								
2	Riset awal		■	■	■	■	■	■	■																		
3	Pembuatan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
5	Seminar Proposal																					■	■				
6	Penyempurnaan Proposal																					■	■				
7	Pengolahan dan analisis data																					■	■	■	■		
8	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■		
9	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	
10	Sidang Meja Hijau																										■

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode dalam mengumpulkan dengan cara yang telah digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akan di teliti (Azwar, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data dokumentasi, Koesioner, dan Observasi. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data Laporan Keuangan Pemerintah yang diberikan melalui website BPKAD dari tahun 2023 yang diperoleh secara tidak langsung. Data – data yang diperlukan pada

penelitian ini merupakan laporan keuangan tahun 2023 dan jawaban koresponden. Responden yang diinginkan berjumlah 37 Orang diantaranya 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 5 Kepala Sub Bagian, 5 Kepala Sub Bidang, dan 10 Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan Observasi dilakukan untuk melakukan proses pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah, khususnya dalam konteks Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Observasi bertujuan untuk mengevaluasi potensi masalah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas keuangan pemerintah. Observasi dapat dilakukan dalam hal berikut :

- a. Observasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) : Menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan target yang diterapkan dalam APBN / APBD
- b. Observasi Laporan Operasional : Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah dalam hal pendapatan dan pengeluaran
- c. Observasi Neraca : Menilai posisi asset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2012) “Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian di klarifikasi,

dianalisis yang selanjutnya di interpretasikan sehingga memberikan gambaran mengenai keadaan yang di teliti.

Adapun observasi yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah :

1) Perencanaan, meliputi :

a. Pemahaman atas Laporan Keuangan Pemerintah, meliputi :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan atas laporan keuangan

b. Penilaian atas Sistem Akuntansi Pemerintah

c. Penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintah

2) Penyusunan, meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan atas laporan keuangan

e. Analisis dan evaluasi

3) Pelaksanaan, meliputi :

a. Memastikan Penerapan SAP yang benar dengan menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yang meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian. Hasil perhitungan rasio-rasio tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif

untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara.

- b. Laporan Keuangan Akurat, transparan dan akuntabel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan BPKAD Sumatera Utara

Dizaman Pemerintahan Belanda, Sumatera Utara Merupakan Suatu Pemerintah yang bernama Gouvernement Van Sumatera, yang meliputi seluruh Sumatera dikepalai oleh seorang Gouverneur berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah Administratif yang dinamakan Keresidenan.

Di zaman permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintah yaitu Provisi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Kersidenan yang dikepali oleh seorang Residen

Pada sidang I Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan -kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan diputuskan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatra Utara (yang terdiri dari keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli), Sub Provinsi Sumatra Tengah Dan Sub Sumatera Selatan. Dalam Perkembangan selanjutnya Undang-undang No. 10 Tahun 1948 tgl. 15 April 1948. Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

1. Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan-kereseidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli.
2. Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan-kersidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
3. Provinsi Sumatera Selatan yang mneliputi Keresidenan-keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung.

Dengan Berdasarkan Kepada Undang-undang No. 10 Tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tgl. 16 Februari 1973 No. 4585/25. DPRD tingkat I Sumatera Utara dengan keputusan tgl.13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 Telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah tgl 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya U.U.No. 10 tahun 1948 tersebut.

Pada permulaan tahun 1949 diadakan reorganisasi Pemerintah Sumatera, atas pertimbangan berhubungan dengan meningkatnya serangan-serangan Belanda.menghendaki suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan sempurna.untuk itu perlu dipusatkan alat-alat kekuasaan sipil dan militer dalam tiap-tiap Daerah Militer Istimewa yang berada dalam satu tangan yaitu Gubernur Militer.Dengan demikian seluruh kekuasaan baik Sipil maupun Militer berada ditangan Gubernur Militer.

Perubahan yang demikian ini ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Darurat R.I. TGL 16 Mei 1949 No. 21/Pem/P.D.R.I. Dalam tindak lanjutnya dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. tgl.17 Mei 1949 No. 22/Pem/P.D.R.I. Jabatan Gubernur Sumatera Utara diadakan.Gubernur yang bersangkutan diangkat menjadi Komisaris dengan tugas-tugas memberi pengawasan dan tuntunan terhadap

Pemerintah, baik Sipil maupun Militer. Selanjutnya dengan Instruksi Dewan Pembantu Dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tgl 15 September 1949 Sumatera Utara dibagi menjadi 2 Daerah Militer Istimewa yaitu Aceh dan Tanah Karo diketahui oleh Gubernur Militer Tgk.M.Daud Bereuh dan Tapanuli/Sumatra Timur Selatan Oleh Gubernur Militer Dr.F.L. Tobing.

Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M dibentuklah provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli / Sumatera Timur. Kemudian dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950. TGL 14 Agustus 1950. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan Daerah yang meliputi Daerah Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Selanjutnya dengan peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tgl. 14 Agustus 1950 (pada waktu R.I.S)ditetapkan bahwa Daerah R.I.S sesudah terbentuk Negara Kesatuan R.I. Terbagi atas daerah-daerah Provinsi:

1. Jawa Barat.
2. Jawa Tengah
3. Jawa timur
4. Sumatera Utara
5. Sumatera Tengah
6. Sumatera Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda Kecil

Dalam Perkembangan Selanjutnya tgl. 7 Desember 1956 diundangkanlah Undang-undang No. 24 Tahun 1956 yaitu Undang-undang tentang

pembentukan, Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Pasal I Undang-undang No. 24 Tahun 1956 ini menyebutkan :

- 1) Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten : 1. Aceh Besar, 2. Aceh Pedie, 3. Aceh Utara, 4. Aceh Timur, 5. Aceh Tengah, 6. Aceh Barat, 7. Aceh Selatan, 8. Kota Besar Kuta Raja, dipisahkan dari lingkungan, Daerah Otonom Provinsi Sumatera Utara dimaksud dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 an dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Provinsi Aceh.
- 2) Provinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai Daerah Otonom Provinsi Aceh tetap disebut Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah Daerah Otonom tingkat II di Sumatera Utara. berdasarkan undang-undang Darurat No. 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar. Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.II adalah 17 buah, saat ini di Sumatera Utara terdiri dari :

a. 25 Kabupaten Yaitu:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Kabupaten Tapanuli Tengah | 4. Kabupaten Nias |
| 2. Kabupaten Tapanui Utara | 5. Kabupaten Langkat |
| 3. Kabupaten Tapanuli Selatan | 6. Kabupaten Karo |

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 7. Kabupaten Deli Serdang | 18. Kabupaten Mandailing Natal |
| 8. Kabupaten Simalungun | 19. Kabupaten Batu Bara |
| 9. Kabupaten Asahan | 20. Kabupaten Padang Lawas |
| 10. Kabupaten Labuhan Batu | 21. Kabupaten Padang Lawas
Utara |
| 11. Kabupaten Dairi | 22. Kabupaten Labuhan Batu
Utara |
| 12. Kabupaten Pak-pak Barat | 23. Kabupaten Labuhan Batu
Selatan |
| 13. Kabupaten Humbang
Hasudutan | 24. Kabupaten Nias Utara |
| 14. Kabupaten Serdang Bedagai | 25. Kabupaten Nias Barat |
| 15. Kabupaten Toba Samosir | |
| 16. Kabupaten Samosir | |
| 17. Kabupaten Nias Selatan | |

b. 8 Kota Yaitu :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Kota Medan | 5. Kota Binjai |
| 2. Kota Pematang Siantar | 6. Kota Tebing Tinggi |
| 3. Kota Sibolga | 7. Kota Padang Sidempuan |
| 4. Kota Tanjung Balai | 8. Kota Gunung Sitoli |

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah Provsu.

Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2 Analisis Persentase Jawaban Responden

Sebelum dilakukan analisis peneliti melakukan pendistribusian jawaban responden, untuk melihat apakah kondisi di lapangan sesuai dengan jawaban responden, dalam penelitian ini menggunakan skala liker dengan skor 1-5.

Tabel 4.1.
Kriteria Jawaban Responden

Kriteria	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
SS	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3

TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Dalam Penelitian ini jumlah responden adalah 37 orang, terdiri dari 27 Laki – Laki dan 10 Perempuan dengan pendidikan S1 berjumlah 20 Orang, S2 Berjumlah 8 Orang, Diploma berjumlah 2 Orang, dan SMA berjumlah 7 Orang.

4.1.2.1. Persentase Responden Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah

Tabel 4.2.
Persentase Jawaban Responden Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah

No.	Uraian Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Penerapan Sistem akuntansi dalam BKAD sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)	17	45,90%	20	54,10%	-	-	-	-	-	-
2	Dalam BPKAD telah melakukan analisis / identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan.	18	48,60%	19	51,40%	-	-	-	-	-	-
3	Staff yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan telah memahami Permendagri nomor 77 tahun 2020.	14	37,80%	20	54,10%	3	8,10%	-	-	-	-
4	Telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi pada instansi tempat saya bekerja.	11	29,70%	22	59,50%	4	10,80%	-	-	-	-
5	Dalam BPKAD telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.	10	27%	19	51,40%	8	21,60%	-	-	-	-
6	Telah menggunakan basis akrual untuk mengakui aset pada	9	24,30%	12	32,40%	16	43,20%	-	-	-	-

	instansi tempat saya bekerja										
7	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	9	25%	24	66,70%	3	8,30%	-	-	-	-
8	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik	8	21,60%	27	73%	2	5,40%	-	-	-	-
9	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif	8	22,20%	22	61,10%	6	16,70%	-	-	-	-
10	Pimpinan telah melakukan pemantauan sistem pengendalian intern dalam rangka memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya bisa segera ditindaklanjuti.	9	24,30%	23	62,20%	5	13,50%	-	-	-	-

Sumber : Data Primer Tahun 2024, diolah

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada BPKAD Prov. Sumut telah sepenuhnya Menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah dengan menggunakan Sistem SIPD dilakukan secara komputerisasi dan berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih Relevan,andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

4.1.2.2.Persentase Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

Tabel 4.3.
Persentase Jawaban Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

No.	Uraian Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu. Yaitu kemandirian ,entitas,Adanya kesinambungan entitas.	13	35,10%	18	48,60%	6	16,20%	-	-	-	-
2	Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.	12	32,40%	18	48,60%	7	18,90%	-	-	-	-
3	Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan yaitu , terbatas pada laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan.	12	32,40%	24	64,90%	1	2,70%	-	-	-	-
4	Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah	14	37,80%	19	51,40%	4	10,80%	-	-	-	-

	mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik										
5	Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya	11	29,70%	12	32,40%	14	37,80%	-	-	-	-
6	Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya	10	27%	24	64,90%	3	8,10%	-	-	-	-
7	Laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib disepakati oleh DPRD	11	29,70%	17	45,9%	8	21,60%	1	2,70%	-	-
8	Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi	8	21,60%	21	56,80%	8	21,60%	-	-	-	-
9	Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	8	22,20%	25	69,40%	3	8,30%	-	-	-	-
10	Pegawai yang bekerja di BPKAD memiliki kemampuan dan mampu menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi.	8	22,20%	19	52,80%	9	25%	-	-	-	-

Sumber : Data Primer Tahun 2024, diolah

Penerapan Akuntansi Pemerintahan sudah berjalan dengan baik di kantor BPKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara) terlihat dari

jawaban responden yang mayoritasnya adalah setuju artinya penerapan akuntansi pemerintahan sudah mengalami peningkatan. Adapun hal yang tidak disetujui mengenai laporan perubahan anggaran dan belanja daerah wajib di sepakati oleh DPRD dan mengenai laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun kendalanya.

4.1.2.3. Persentase Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4.4.
Persentase Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No.	Uraian Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	14	37,80%	22	59,50%	1	2,70%	-	-	-	-
2	Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keuntungan	12	32,40%	16	43,20%	9	24,30%	-	-	-	-
3	Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu (feedback value)	20	55,60%	16	44,40%	-	-	-	-	-	-
4	Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian di masa datang (predictive value)	19	51,40%	17	45,90%	1	2,70%	-	-	-	-

5	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan	11	29,70%	13	35,10%	13	35,10%	-	-	-	-
6	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu	10	27%	19	51,40%	8	21,60%	-	-	-	-
7	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	8	21,60%	19	51,40%	10	27%	-	-	-	-
8	Pemerintahan daerah menggunakan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun	6	16,20%	5	13,50%	26	70,30%	-	-	-	-
9	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	8	21,60%	20	54,10%	9	24,30%	-	-	-	-
10	Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.	8	21,60%	26	70,30%	3	8,10%	-	-	-	-

Sumber : Data Primer Tahun 2024, diolah

Kualitas Laporan Keuangan sudah berjalan dengan baik di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terlihat dari jawaban responden yang mayoritasnya setuju artinya Kualitas Laporan Keuangan mengalami peningkatan.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini variabel – variabel penelitian diklarifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu : variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan sedangkan variabel yang terikat adalah Laporan Keuangan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah BKAD Provinsi Sumatera Utara periode. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam Meningkatkan Laporan Keuangan Pemerintah.

Adapun observasi yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah :

- 1) Perencanaan, meliputi :
 - a. Pemahaman atas Laporan Keuangan, meliputi :
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dalam LRA terdapat empat unsur utama yang harus disajikan yaitu :
 - a. Pendapatan
Pendapat - LRA yang terdapat dilaporan realisasi anggaran pada tahun 2023 IDR 12.758.2543697.290,51 sedangkan Anggaran yang diberikan senilai IDR 14.375.662.997.407.
 - b. Belanja
Belanja yang terdapat dilaporan realisasi anggaran pada tahun 2023 IDR 13.747.080.589.241,99 sedangkan Anggaran yang diberikan senilai IDR 15.391.837.409.257.

c. Transfer

Transfer yang terdapat di laporan realisasi anggaran pada tahun 2023 terdiri dari 2 ; Transfer Masuk yaitu pendapatan transfer senilai IDR 5.443.196.241.831 sedangkan Anggaran yang diberikan senilai IDR 5.532.890.363.040; Transfer Keluar yaitu belanja Transfer yang berupa belanja bagi hasil senilai IDR 3.032.087.837.486,55 sedangkan Anggaran yang diberikan senilai IDR 3.046.552.636.573.

d. Pembiayaan

Pembiayaan yang terdapat di laporan realisasi anggaran pada tahun 2023 IDR 1.071.462.606.520,71 sedangkan Anggaran yang diberikan senilai IDR 1.016.174.411.850.

2. Neraca

Dalam Neraca terdapat tiga unsur utama yang harus disajikan yaitu :

a. Aset

Aset yang terdapat di laporan Neraca pada tahun 2023 IDR 24.392.124.270.266,11

b. Kewajiban

Kewajiban yang terdapat di laporan Neraca pada tahun 2023 IDR 2.819.161.340.236,26

c. Ekuitas Dana

Ekuitas yang terdapat di laporan Neraca pada tahun 2023 IDR 21.572.962.930.029,85

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Dalam Laporan Arus Kas terdapat 2 unsur utama yang harus disajikan yaitu :

a) Penerimaan Kas

Penerimaan Kas yang terdapat dilaporan Neraca pada tahun 2023 terdiri dari :

Arus kas Masuk dari aktivitas Operasi IDR 12.757.833.199.492,51

Arus kas Masuk dari aktivitas Investasi IDR 0

Arus kas Masuk dari aktivitas Pendanaan IDR 0

Arus kas Masuk dari aktivitas Transitoris IDR 473.216.300.923

b) Pengeluaran Kas

Pengeluaran Kas yang terdapat dilaporan Neraca pada tahun 2023 terdiri dari :

Arus kas Masuk dari aktivitas Operasi IDR 11.118.760.253.480,63

Arus kas Masuk dari aktivitas Investasi IDR 2.629.552.763.164,36

Arus kas Masuk dari aktivitas Pendanaan IDR 4.698.000.000

Arus kas Masuk dari aktivitas Transitoris IDR 473.206.852.098

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

b. Penilaian atas Sistem Akuntansi Pemerintah, meliputi :

1. Efektivitas mampu mencapai tujuan pengelolaan keuangan
2. Efisiensi meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan keuangan
3. Relevansi dengan kebutuhan dan kondisi keuangan
4. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan
5. Transparansi yang dihasilkan mudah dipahami dan diakses oleh publik
6. Akurasi dapat memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan dengan akurat
7. Pemenuhan standar akuntansi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan di kota yang lain
8. Integrasi yang digunakan yaitu sistem anggaran dan sistem informasi manajemen

c. Penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintah, meliputi :

1. Sesuai dengan Prinsip Akuntansi untuk memastikan Laporan Keuangan pemerintah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dan prinsip akuntansi akrual
 2. Manfaat bagi pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas pengelolaan keuangan public, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik
 3. Tantangan implementasi seperti kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi yang memadai.
- 2) Penyusunan, meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Unaudited)	%	REALISASI 2022 (Audited)
PENDAPATAN – LRA	4.1.1	14.375.662.997.407,00	12.758.254.697.290,51	88,75	12.594.412.688.861,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	4.1.1.1	8.738.713.169.367,00	7.226.109.603.500,51	82,69	7.258.018.251.932,51
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	4.1.1.1.1	7.427.338.695.260,00	6.667.891.089.707,94	89,77	6.646.504.121.057,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.1.1.1.2	55.886.676.040,00	33.234.330.583,00	59,47	28.954.300.036,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.1.1.1.3	403.809.533.678,00	299.801.727.761,00	74,24	302.399.281.274,21
Lain-lain PAD yang Sah – LRA	4.1.1.1.4	851.678.264.389,00	225.182.455.448,57	26,44	280.160.549.565,30
PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	5.532.890.363.040,00	5.443.196.241.831,00	98,38	5.250.014.270.033,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.1.1.2.1	5.532.890.363.040,00	5.443.196.241.831,00	98,38	5.250.014.270.033,00
Dana Perimbangan	4.1.1.2.1.1	5.503.334.461.040,00	5.413.640.339.831,00	98,37	5.213.826.023.033,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	4.1.1.2.1.1.1	597.182.034.040,00	581.910.953.859,00	97,44	739.563.418.216,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	4.1.1.2.1.1.2	2.683.046.680.000,00	2.682.814.024.612,00	99,99	2.432.954.103.819,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.1.1.2.1.1.3	427.465.166.000,00	406.604.190.383,00	95,12	282.339.159.482,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.1.1.2.1.1.4	1.795.640.581.000,00	1.742.311.170.977,00	97,03	1.758.969.341.516,00
Dana Insentif Daerah (DID)	4.1.1.2.1.2	29.555.902.000,00	29.555.902.000,00	100,00	36.188.247.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	4.1.1.2.1.2.1	29.555.902.000,00	29.555.902.000,00	100,00	36.188.247.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.1.1.3	104.059.465.000,00	88.948.851.959,00	85,48	86.380.166.896,00
Pendapatan Hibah	4.1.1.3.1	79.059.465.000,00	80.249.646.343,00	101,51	73.032.471.483,00
Pendapatan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	4.1.1.3.2	25.000.000.000,00	8.699.205.616,00	34,80	13.347.695.413,00
BELANJA	4.1.2	15.391.837.409.257,00	13.747.080.589.241,99	89,31	12.509.062.821.349,16
BELANJA OPERASI	4.1.2.1	8.407.455.852.331,00	8.027.938.578.920,08	95,49	7.582.911.612.511,14
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	3.548.317.395.318,00	3.291.794.526.059,50	92,77	3.392.784.207.610,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	3.013.608.473.855,00	2.918.592.156.100,46	96,85	2.964.824.567.292,63
Belanja Hibah	4.1.2.1.3	1.829.709.983.158,00	1.801.731.896.760,12	98,47	1.185.343.267.346,51
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.4	15.820.000.000,00	15.820.000.000,00	100,00	39.959.570.262,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2	3.854.834.525.278,00	2.629.552.763.164,36	68,21	1.775.917.392.367,02
Belanja Modal Tanah	4.1.2.2.1	158.530.806.020,00	158.445.998.020,00	99,95	315.949.983.533,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	443.423.281.931,00	433.303.653.475,00	97,72	484.643.810.013,20
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	961.713.609.744,00	924.995.966.869,66	96,18	306.906.279.946,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	2.145.725.890.963,00	976.215.110.475,52	45,50	563.087.763.298,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	145.440.936.620,00	136.592.036.324,18	93,92	105.329.555.576,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28	384.450.625,00
Belanja Tak Terduga	4.1.2.3	82.994.395.075,00	57.501.409.671,00	69,28	384.450.625,00
BELANJA TRANSFER	4.1.3	3.046.552.636.573,00	3.032.087.837.486,55	99,53	3.149.849.365.846,00
Belanja Bagi Hasil	4.1.3.1	2.704.480.636.573,00	2.704.480.636.573,00	100,00	2.697.082.376.553,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	4.1.3.1.1	2.704.480.636.573,00	2.704.480.636.573,00	100,00	2.697.082.376.553,00
Belanja Bantuan Keuangan	4.1.3.2	342.072.000.000,00	327.607.200.913,55	95,77	452.766.989.293,00

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Unaudited)	%	REALISASI 2022 (Audited)
SURPLUS/DEFISIT	4.1.4	(1.016.174.411.850,00)	(988.825.891.951,48)	0	85.349.867.512,35
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.5.1	1.072.174.411.850,00	1.076.160.606.520,79	100,37	1.097.493.514.239,44
Penggunaan SILPA	4.1.5.1.1	1.072.174.411.850,00	1.076.160.606.520,79	100,37	1.097.493.514.239,44
Penerimaan Piutang Daerah	4.1.5.1.2	0,00	0,00		0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.5.2	56.000.000.000,00	4.698.000.000,00	8,39	106.682.775.231,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.5.2.1	56.000.000.000,00	4.698.000.000,00	8,39	106.682.775.231,00
PEMBIAYAAN NETTO	4.1.5	1.016.174.411.850,00	1.071.462.606.520,79	105,44	990.810.739.008,44
SILPA	4.1.6	0,00	82.636.714.569,31		1.076.160.606.520,79

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN

Sumber : <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah>
Gambar 4.1 : Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun 2023

b. Neraca

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
ASET	4.3.1		
ASET LANCAR	4.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	17.127.463,00	8.648.960,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	0,00	379.006,00
Kas di BLUD	4.3.1.1.4	11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Kas Dana BOS	4.3.1.1.5	2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya	4.3.1.1.6	789.281.538,00	969.172.054,00
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.7	10.226.379.505,00	38.876.031.067,00
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.8	2.057.670.837,00	1.282.296.637,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.9	18.397.973.553,00	6.816.770.630,76
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.10	5.294,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	4.3.1.1.11	3.621.308.415,00	0,00
Piutang Lainnya	4.3.1.1.12	6.469.736.883,62	17.777.509.123,62
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.13	(10.771.048.059,68)	(10.365.269.649,26)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.14	3.424.534.218,83	3.401.195.757,66
Persediaan	4.3.1.1.15	208.005.170.342,00	249.900.588.271,17
JUMLAH ASET LANCAR		322.466.761.936,08	1.383.892.501.112,74
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya			
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		4.465.839.894.981,13	4.282.925.763.980,94
ASET TETAP	4.3.1.3		
Tanah	4.3.1.3.1	5.623.599.018.273,54	5.066.373.766.686,35
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	3.817.958.565.687,36	3.472.654.344.405,36
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	6.138.417.667.302,30	5.317.385.989.607,83

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	11.490.417.274.295,52	11.003.841.954.473,61
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	1.010.987.785.761,80	892.438.515.120,87
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	1.997.204.034.258,58	1.005.259.249.513,85
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(12.944.711.018.643,43)	(12.145.128.409.395,59)
JUMLAH ASET TETAP		17.133.873.326.935,67	14.612.825.410.412,28
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang		139.172.894.163,76	139.315.467.313,76
Aset Tidak Berwujud		105.273.634.246,03	113.105.492.153,14
Aset Lain-lain		2.178.899.594.840,29	2.234.902.144.291,47
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(51.059.676.836,85)	(47.429.318.394,69)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (DTF)		97.657.840.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		2.469.944.286.413,23	2.439.893.785.363,68
JUMLAH ASET		24.392.124.270.266,11	22.719.537.460.869,64
KEWAJIBAN	4.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	52.251.783,00	42.792.754,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.2	2.214.803.358,00	1.283.452.150,00
Utang Belanja	4.3.2.1.3	1.426.569.831.372,30	1.179.686.331.709,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.4	911.767.714.512,96	457.921.241.039,79
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.340.604.601.026,26	1.638.913.817.652,79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.3.2.2.1	478.556.739.210,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		478.556.739.210,00	536.058.148.881,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.819.161.340.236,26	2.174.971.966.533,79
EKUITAS			
Ekuitas	4.3.3	21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
JUMLAH EKUITAS		21.572.962.930.029,85	20.544.565.494.335,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.392.124.270.266,11	22.719.537.460.869,64

Bj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

 HASSANUDIN

5

Sumber : <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah>

Gambar 4.2 : Neraca Periode Tahun 2023

c. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		6.667.891.089.707,94	6.646.504.121.057,00
Pendapatan Retribusi Daerah		33.234.330.583,00	28.954.300.036,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		299.801.727.761,00	302.399.281.274,21
Lain-lain PAD yang sah		224.760.957.650,57	280.160.549.565,30
Dana Bagi Hasil (DBH)		581.910.953.859,00	739.563.418.216,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		2.682.814.024.612,00	2.432.954.103.819,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		406.604.190.383,00	282.339.159.482,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		1.742.311.170.977,00	1.758.969.341.516,00
Pendapatan Hibah		80.249.646.343,00	73.032.471.483,00
Pendapatan Lainnya		8.699.205.616,00	13.347.695.413,00
Dana Insentif Daerah		29.555.902.000,00	36.188.247.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		12.757.833.199.492,51	12.594.412.688.861,51
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		3.291.794.526.059,50	3.392.784.207.610,00
Belanja Barang dan Jasa		2.919.824.583.503,46	2.964.824.567.292,63
Hibah		1.801.731.896.760,12	1.185.343.267.346,51
Bantuan Keuangan		327.607.200.913,55	452.766.989.293,00
Bantuan Sosial		15.820.000.000,00	39.959.570.262,00
Belanja Tak Terduga		57.501.409.671,00	384.450.625,00
Bagi Hasil Pajak		2.704.480.636.573,00	2.697.082.376.553,00
Jumlah Arus Kas Keluar		11.118.760.253.480,63	10.733.145.428.982,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.639.072.946.011,88	1.861.267.259.879,37
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah		158.445.996.020,00	315.949.983.533,00
Belanja Peralatan dan Mesin		433.303.653.475,00	484.643.810.013,20
Belanja Gedung dan Bangunan		924.995.966.869,66	306.906.279.946,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		976.215.110.475,52	563.087.763.298,75
Belanja Aset Tetap Lainnya		136.592.036.324,18	105.329.555.576,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.629.552.763.164,36	1.775.917.392.367,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(2.629.552.763.164,36)	(1.775.917.392.367,02)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00

URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.698.000.000,00	106.682.775.231,00
Jumlah Arus Kas Keluar		4.698.000.000,00	106.682.775.231,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(4.698.000.000,00)	(106.682.775.231,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.5		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		473.206.841.894,00	528.981.545.297,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Belum Disetor		9.459.029,00	0,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0	0,00
Saldo Sisa Bendahara BOS Tahun Lalu		0	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		473.216.300.923,00	528.981.545.297,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		473.206.841.894,00	528.938.752.543,00
Kelebihan Pembayaran PPh 21		10.204,00	
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0	0,00
Sisa Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan		0	0,00
Pelunasan Utang PFK-Kas Bendahara Pengeluaran tahun 2021		0,00	11.028.400,00
Jumlah Arus Kas Keluar		473.206.852.098,00	528.949.780.943,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		9.448.825,00	31.764.354,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(995.168.368.327,48)	(21.301.143.364,65)
Saldo Awal Kas		1.076.203.399.274,79	1.097.504.542.639,44
Saldo Akhir Kas		81.035.030.947,31	1.076.203.399.274,79
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		17.127.463,00	8.648.960,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	379.006,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya		789.281.538,00	969.172.054,00
Saldo Akhir Kas	4.5.6	81.035.030.947,31	1.076.203.399.274,79
Kelebihan Pembayaran PPh 21		10.204,0	0,00
Utang PFK		(52.251.783,00)	(42.792.754,00)
Silpa		80.982.789.368,31	1.076.160.606.520,79

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

 HASSANUDIN

Sumber : <https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah>
Gambar 4.3 : Laporan Arus Kas Periode Tahun 2023

- d. Catatan atas laporan keuangan
 - e. Analisis dan evaluasi
- 3) Pelaksanaan, meliputi :
- a. Penerapan SAP yang benar dengan menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yang meliputi

- 1. Rasio Derajak desentralisasi fiscal,

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah t}}{\text{Total Pendapatan Daerah t}} \times 100 \%$$

$$DDF = \frac{7.226.109.603.500,51}{12.758.254.697.290,51} \times 100 \%$$

$$DDF = 56,63 \%$$

Skala interval menjelaskan diatas 50,00 kemampuan keuangan sangat baik maka untuk kemampuan keuangan BPKAD tahun 2023 sangat baik.

- 2. Rasio kemandirian keuangan daerah,

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah t}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

$$RKKD = \frac{7.226.109.603.500,51}{5.443.196.241.831,00} \times 100 \%$$

$$RKKD = 132,75 \%$$

Pola hubungan dan tingkat kemampuan menjelaskan jika Tingkat kemandirian lebih dari 75 % maka kemampuan keuangan tinggi dan pola hubungan disebut dengan delegatif Dimana campur tangan pemerintahan pusat sudah tidak ada kerana daerah telah benar benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

- 3. Rasio efektivitas PAD,

$$REP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{REP} = \frac{7.226.109.603.500,51}{8.738.713.169.367,00} \times 100 \%$$

$$\text{REP} = 82 \%$$

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah diatas 100 % maka kinerja keuangan sangat efektif, 100 % maka kinerja keuangan efektif, 90%-99% maka kinerja keuangan cukup efektif, 75%-89% maka kinerja keuangan kurang efektif. Sedangkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Prov Sumut 2023 82 % dimana penilaiaian efektifitas kurang efektif.

4. Rasio efisiensi keuangan daerah,

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{REKD} = \frac{13.747.080.589.241,99}{12.758.254.697.290,51} \times 100 \%$$

$$\text{REKD} = 107,75 \%$$

Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah diatas 40 % maka kinerja keuangan tidak efisien, dibawah 10 % maka kinerja keuangan sangat efisien, 10%-29% maka kinerja keuangan efisien, 21%-30% maka kinerja keuangan cukup efisien, 31%-40% maka kinerja keuangan kurang efisien. Sedangkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Prov Sumut 2023 107,75 % dimana penilaiaian efektifitas adalah tidak efisien.

5. Rasio keserasian

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{8.027.938.578.920,08}{13.747.080.589.241,99} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = 58,3 \%$$

Umumnya belanja operasi mendominasi total belanja daerah proporsinya yaitu antara 60-90%. Jika tingkat pendapatan tinggi maka cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi juga.

Rasio belanja modal adalah perbandingan dari total belanja modal dan total belanja daerah. Umumnya proporsi belanja modal dan belanja daerah yaitu antara 5 – 20%. Berikut perhitungan belanja :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{2.629.552.763.164,36}{13.747.080.589.241,99} \times 100 \%$$

$$\text{Belanja Modal} = 19,12 \%$$

Dalam menentukan besarnya belanja operasi dan belanja modal di APBD ini belum terdapat patokan yang baku, hal ini terjadi karena belanja ini disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah yang mana jika pemerintah daerah berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, maka pemerintah daerah sudah seharusnya memperbesar anggaran di belanja modalnya dari pada modal operasi.

- b. Laporan Keuangan BPKAD Prov. Sumut tergolong Akurat, transparan dan akuntabel.

4.2 Pembahasan

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian mengenai analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada BPKAD Prov. Sumut merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah yang baik akan mendukung pengelolaan anggaran yang tepat, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pencatatan yang rapi, pelaporan yang jelas, serta pengawasan yang ketat, BPKAD Prov. Sumut dapat mengelola keuangan dengan lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Fokus Penelitian dijelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah sehingga temuan Penelitian Pada BPKAD Prov. Sumut telah sepenuhnya Menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah dengan menggunakan Sistem SIPD dilakukan secara komputersasi berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih Relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga mudah dalam pengambilan keputusan hal ini didukung dengan adanya faktor pendukung yaitu

sumber daya manusia yang memadai, teknologi yang memadai serta fasilitas dan perlengkapan yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Vira Saputri Yuniar (2021) dengan menggunakan metode kualitatif Deskriptif dalam penelitiannya, mengemukakan hasil temuan ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan pada Kantor Kecamatan Makassar telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua sistem akuntansi keuangan telah dijalankan dengan baik.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah pada BPKAD Prov. Sumut sejak penerapan SAP berbasis akrual telah membawa beberapa perubahan positif dalam pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu keberhasilan utama adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih lengkap dan informatif. Laporan ini memungkinkan pemerintah untuk menyajikan posisi keuangan yang lebih komprehensif, mencakup informasi tentang utang jangka panjang, aset tetap, serta kewajiban lainnya yang tidak tercatat dalam basis kas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dapat dibuktikan dengan menggunakan menganalisis rasio keuangan, yang meliputi : Rasio Derajak desentralisasi fiskal untuk menunjukkan tren peningkatan signifikan pada tahun 2023 rasio ini berada pada kategori sangat baik dengan nilai rasio 56,63%.

Peningkatan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah.

Dari sisi kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah sumut menunjukkan perkembangan mengembirakan. Rasion ini berada pada tingkat 132,75 % dimana hal ini menunjukkan pola hubungan mayoritas "Delegatif" yang mencerminkan ketergantungan yang semakin rendah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kategori "kurang efektif" dimana rasio ini berada pada tingkat 82 % kemungkinan karena peningkatan target yang terlalu ambisius dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Dari segi efisiensi keuangan daerah pemerintah daerah sumatera utara "Tidak Efisien" tren ini mengkhawatirkan karena menunjukkan peningkatan belanja daerah yang tidak di imbangi dengan peningkatan pendapatan. Kondisi ini mencerminkan adanya defisit anggaran yang perlu mendapat perhatian serius untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Rasio kerahasiaan Belanja dalam menentukan besarnya belanja operasi dan belanja modal di APBD ini belum terdapat patokan yang baku, hal ini terjadi karena belanja ini disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah yang mana jika pemerintah daerah berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, maka pemerintah daerah sudah seharusnya memperbesar anggaran di belanja modalnya dari pada modal operasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh yang telah dilakukan serta pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Sistem Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Prov. Sumatera :

1. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada BPKAD Prov. Sumut sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni Sistem Akuntansi Pemerintah. Sehingga informasi mengenai penyajian Laporan Keuangan yang dihasilkan dikatakan sudah akurat karena informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah membawa beberapa perubahan positif dalam pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu keberhasilan utama adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih lengkap dan informatif. Hanya saja pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk efektifitas pengelolaan keuangan kurang efektif dan tingkat efisiensi yang tidak efisien hal ini dapat dilihat total anggaran lebih tinggi dan realisasi yg terjadi dan realisasi pendapatan lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan dengan beberapa saran yaitu :

1. Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat sudah cukup baik digunakan akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah

penerapan standar akuntansi untuk efektif dan efisien sehingga pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama diharapkan dapat menambah variabel penelitian sehingga memperluas pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Putra Nainggolan, E. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 118–126. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.4383>
- Baihaqi. (2018). Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. *ABIS (Accounting and Business Infomation Systems Journal)*, 6(1).
- Fauziah, I. (2018). *Standar Akuntansi Pemerintah* (Sam, Ed.; I). Pt. Serambi Semesta Distributor.
- IHPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023*. (2023).
- Ikhyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Kapantow, E. S., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 11(2), 494–505.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *Akmen*, 18(1), 14–27.
- Mas'ut, Dewi, I. P., & Barus, M. J. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 37–48. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>
- Nugraeni, & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 18–32.
- Nurhasanah, Firmansyah, & Sari, K. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntanika*, 4(1), 105–121.

- Peraturan Pemerintah NO. 1, Pub. L. No. 1, Peraturan Pemerintah (2020).
- Peraturan Pemerintah RI NO. 60, Pub. L. No. 60, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2008).
- Peraturan Pemerintah RI NO. 71, Pub. L. No. 71, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010).
- Permadi, H. H., Permadi, H. H., Rahmawati, R., & Carmidah. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak*, 1(3).
- PMK RI NO. 238 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah, Pub. L. No. 238/PMK.05/2011, Peraturan Menteri Keuangan RI (2011).
- Ramadhan, P. R., & Firza Alpi, M. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Seminar Nasional Taman SiswaBima,1(1),147–153.
<http://semnas.tsb.ac.id/index.php/semnastsb2019/index>
- Ratna, Manurung, J. S., Darmawati, Napitulu, T. T. P., & Syahdewa, B. I. (2023). Peranan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 1.
- Rizki, M. S., & Rialdy, N. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(2), 522.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i2.757>
- Rompas, F. V., & Kindangen, W. D. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 461–468.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 4(1), 366–380.
- Sari, A. P., & Nurlaila. (2022). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 172–181. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17714>

- Sinurat, M., Sukma, R., Putri, S., Sinaga, W., & Johannes, A. W. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(1), 89–105. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance*, 03(1), 67–79.
- Standar Akuntansi Pemerintahan* (I). (2007). Pustaka Yudistia. https://books.google.co.id/books?id=2o9TWrxYxIC&printsec=frontcover&dq=sistem+akuntansi+pemerintahan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjfiqp9O2JAxXV8zgGHQnHDt8Q6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=sistem%20akuntansi%20pemerintahan&f=false
- Undang Undang RI NO.17 (2003).
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–4.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, 14(1), 56–64.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 15 Januari

20 25



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : M U H A M M A D R I G K I N U G R A H A

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 1 7 2

Tempat/Tgl Lahir : M E D A N " S E P T E M B E R 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J I S E N T O S A L A M A
G G R U K U N N O 2 3 A

Tempat Penelitian: B A D A N K E U A N G A N A S E T D A E
R A H P R O V I N S I S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J L I M A M B O N J O L N O 6 1
S U K A D A M A I K E C M E D A N P O L O N I

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum
S. E., M. Si

M. RIGKI NUGRAHA

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

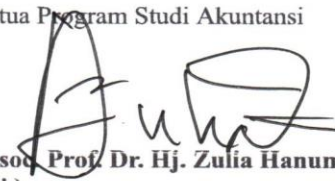
Nomor Agenda: 63/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/04/2024

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIQKI NUGRAHA
NPM : 1905170172
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 15/04/2024
Nama Dosen pembimbing*) : Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D (05 Juni 2024) 05 Juni 2024

Judul Disetujui**)


.....
Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar
Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas
Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.
.....
.....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

04 Januari 2025 .
Medan,

Dosen Pembimbing


(Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D
(.....))

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 157/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 17 Rajab 1446 H
17 Januari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Jl. Imam Bonjol No 61 Sukadamai Kec . Medan Polonia
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Riqki Nugraha
Npm : 1905170172
Program Studi : Akuntansi
Semester : XI (Sebelas)
Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peninggal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa meragukan siapa yang disebut sebagai nomor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 157/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 4 Januari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Muhammad Riqki Nugraha
N P M : 1905170172
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 Januari 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Rajab 1446 H
17 Januari 2025 M



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peringgal





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Kode Pos 20157
MEDAN

Medan, 30 Januari 2025

Nomor : 000.1.9/170 / Sekr/ I / 2025
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Permohonan Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 157/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
tanggal 17 Januari 2025, perihal izin riset pendahuluan atas nama di bawah ini :

Nama : Muhammad Riqki Nugraha
NPM : 1905170172
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
Provinsi Sumatera Utara.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan Mahasiswa tersebut di atas
melaksanakan riset di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Utara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari s.d 04 April 2025 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, selanjutnya hasil riset agar dikirim ke Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.





Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS,

Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670818 199401 1 002

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

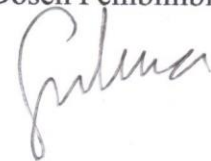
Nama Lengkap : Muhammad Riqki Nugraha
NPM : 1905170172
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D
Judul Penelitian : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2	- Indikator diganti menjadi unsur-unsur	1/9/2025	
Bab 3	- Jelaskan berapa rencana responden yang akan diminta mengisi kuesioner	12/9/2025	
Bab 4	- Jelaskan berapa responden yang menjawab koesioner	12/9/2025	
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Hasil diskusi dan pembahasan di sidang	15/9/2025	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M Shareza Hafiz, SE., M.Acc)

Medan, 15 SEPTEMBER 2025
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing



(Sukma Lesmana, S.E., M.Si., Ph.D)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 12 Juni 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Muhammad Riqki Nugraha*
NPM. : 1905170172
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 11 September 2000
Alamat Rumah : Jln. Sentosa Lama GG.Rukun No.23A
Judul Proposal : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latar belakang masalah</i>
Bab II	<i>teori di pusbank</i>
Bab III	<i>metode penelitian</i>
Lainnya	<i>disformatika penulisan bagian buktikan pedoman, revisi 7 Dosen AHT UMSU</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, *12 Juni 2025*

TIM SEMINAR

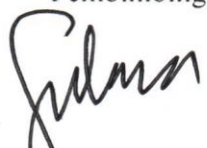
Ketua


Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris


Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing


Sukma Lehana., S.E., M.Si., Ph.D

Pemanding


Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 12 Juni 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Riqki Nugraha
NPM : 1905170172
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 11 September 2000
Alamat Rumah : Jln. Sentosa Lama GG.Rukun No.23A
Judul Proposal : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Sukma Lesmana., S.E., M.Si., Ph.D*

Medan, 12 Juni 2025

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Sukma Lesmana., S.E., M.Si., Ph.D

Pembanding



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Kode Pos 20157

M E D A N

Medan, 16 September 2025

Nomor : 000.1.9/2160/BKAD/IX/ 2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Surat Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 2765/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 08 September 2025, perihal menyelesaikan riset atas nama di bawah ini :

Nama : Muhammad Riqki Nugraha
NPM : 1905170172
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Maka sebagaimana nama tersebut di atas telah menyelesaikan riset di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, sejak tanggal 03 Februari s/d 04 April 2025 dan melaksanakannya dengan baik.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Pih. SEKRETARIS,



SUWITO, SE
PEMBINA

NIP. 19720319 199602 1 005



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2765/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 16 Rabi'ul Awwal 1447 H
08 September 2025 M

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Keuangan Aset Daerah

Jl. Imam Bonjol No.61 Suka Damai Kec.Medan Polonia, Kota Medan

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Riqki Nugraha
N P M : 1905170172
Semester : X (Eks)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Akuntansi pemerintahan Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUME VITAE)

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muhammad Riqki nugraha
NPM : 1905170172
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 11 September 2000
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sentosa Lama Gg Rukun No.23a Medan
No. Telpon : 0821 4805 3254
Email : rikinugraha288@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Selamat
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Juraini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sentosa Lama Gg Rukun No.23a Medan
No. Telpon : 0853 7205 5600
Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD 060853 (Tahun 2006 – 2012)
Sekolah Menengah Tinggi Pertama : MTS Teladan Medan (Tahun 2012 – 2015)
Sekolah Menengah Tinggi Atas : SMK Penerbangan PBD Medan (Jurusan Akuntansi)
(Tahun 2015 – 2018)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Medan, 15 September 2025



Muhammad Riqki Nugraha

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

B *I* U ☉ ✎

Bapak/ Ibu responden yang terhormat :

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih sebanyak - banyaknya atas ketersediaan Bapak/Ibu mengisi koesioner ini . Adapun kami sampaikan bahwa koesioner ini dibuat oleh :

Nama : Muhammad Riqki Nugraha

NPM : 1905170172

Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi

Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Koesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir / skripsi saya yang berjudul " ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA" Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi koesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya koesioner ini. Atas kerjasama dan kesedian Bapak/Ibu dan Saudara/i, Peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Muhammad Riqki Nugraha

Jenis kelamin Responden :

- Laki - Laki
- Perempuan

Pendidikan terakhir :

- SMA
- DIPLOMA
- S1
- S2

Cara pengisian koisioner Bapak/Ibu/Saudara/I cukup mengisi jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan Checklist Symbol (✓) Pada kolom yang telah disediakan. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap Angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu ? Saudara/I . Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut :

- (SS) Sangat setuju = Skor 5
(S) Setuju = Skor 4
(KS) kurang setuju = Skor 3
(TS) Tidak setuju = Skor 2
(STS) Sangat tidak setuju = Skor 1

1. Penerapan Sistem akuntansi dalam BKAD sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Dalam BPKAD telah melakukan analisis / identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan.

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

3. Staff yang ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan telah memahami Permendagri nomor 77 tahun 2020.

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

4. Telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi pada instansi tempat saya bekerja.

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

7. Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

8. Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

9. Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

10. Pimpinan telah melakukan pemantauan sistem pengendalian intern dalam rangka memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya bisa segera ditindaklanjuti.

- Sangat Setuju
 Setuju
 Kurang Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

Standar Akuntansi pemerintahan (X2)



Cara pengisian koesioner Bapak/Ibu/Saudara/I cukup mengisi jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan Checklist Symbeol (✓) Pada kolom yang telah disediakan. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu ? Saudara/I . Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut :

- (SS) Sangat setuju = Skor 5
- (S) Setuju = Skor 4
- (KS) kurang setuju = Skor 3
- (TS) Tidak setuju = Skor 2
- (STS) Sangat tidak setuju = Skor 1

1. Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu. Yaitu kemandirian ,entitas,Adanya kesinambungan entitas.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

2. Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

3. Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan yaitu , terbatas pada laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

4. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju

5. Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

6. Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap aset, kewenangan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

7. Laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib disepakati oleh DPRD

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

8. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai keluar masuk kas selama periode akuntansi

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

9. Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

10. Pegawai yang bekerja di BPKAD memiliki kemampuan dan mampu menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi.

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Kualitas Laporan Keuangan (Y)



Cara pengisian koisioner Bapak/Ibu/Saudara/i cukup mengisi jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan Checklist Symbel (✓) Pada kolom yang telah disediakan. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap ada satu jawaban. Setiap Angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu ? Saudara/i . Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut :

(SS) Sangat setuju = Skor 5

(S) Setuju = Skor 4

(KS) kurang setuju = Skor 3

(TS) Tidak setuju = Skor 2

(STS) Sangat tidak setuju = Skor 1

1. Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

2. informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keuntungan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

3. Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengkoreksi keputusan pengguna di masa lalu (feedback value)

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

4. Informasi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian di masa datang (predictive value)

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

5. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

6. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

7. Informasi yang termaut dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

8. Pemerintahan daerah menggunakan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

9. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

10. Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.

- Sangat Setuju
- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju